

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian tentang Rekulturisasi

1. Pengertian Rekulturisasi

Rekulturisasi berasal dari pemisahan kata re- dan kultur, dengan arti bahwa kata re mengandung arti kembali dan kata kultur adalah proses pembudayaan. Kultur merupakan sebuah persepsi, ide dalam bentuk aktivitas yang teratur, berpola, sistematis dan dijalani dengan sebuah kebiasaan. Pemaknaan istilah rekulturisasi sebuah pembaharuan dalam proses pembudayaan yang nantinya akan diarahkan pada perkembangan kepribadian, kemandirian dan mampu bekerja secara bersama-sama dengan orang lain. Kemandirian dari kemampuan untuk bekerja secara bersama-sama merupakan bagian dari prinsip yang mendasari masyarakat belajar abad 21 yang memperoleh pengesahan dari *United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO) pada konferensi tahunannya di *Melbourne* (Diptoadi, 1999, hlm.165). Rekulturisasi adalah sistem pembudayaan karakter baik kepada seseorang atas suatu keyakinan, nilai dan aturan baru yang diharapkan. Proses Pembudayaan suatu nilai kreativitas, otonomi/ kemandirian, dan relevansi pendidikan merupakan utama dari sebuah rekulturisasi (Triati, 2019). Hubungan antara sumber daya manusia yang bermutu dengan proses pembangunan tidak akan sulit jika lembaga-lembaga pendidikan untuk mempersiapkan diri agar menciptakan sumber daya manusia yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif yang relevan dengan kebutuhan pembangunan. Oleh karena itu lembaga-lembaga pendidik perlu melakukan restrukturisasi, rekulturisasi, refigurisasi. Mekanisme budaya adalah tindakan yang memunculkan dan menjadikan sesuatu yang berarti bagi kemanusiaan. Ini menjadi nilai tambah dalam arti fase tersebut benar-benar berkelanjutan. Kebudayaan dapat dicapai dengan penggunaan metode pembelajaran, baik formal maupun informal. Contoh pembelajaran formal dapat dipelajari oleh lembaga pendidikan. Contoh proses belajar secara formal dapat dipelajari melalui institusi

pendidikan seperti sekolah, sedangkan contoh secara informal dapat dipelajari di dalam keluarga dan lingkungan masyarakat. Sejalan dengan uraian diatas, rekulturisasi dapat dijabarkan sebagai penataan kembali budaya atau budaya sebagai pengaturan umum kualitas dan keyakinan, yang saling terkait dengan individu dalam suatu asosiasi, konstruksi otoritatif dan kerangka administrasi yang menghasilkan norma-norma perilaku (Yusuf, 2000).

2. Proses Pembudayaan Pendidikan (Enkulturas)

Individu belajar dan menyesuaikan alam pikiran dan sikapnya dalam kebudayaannya dengan adat istiadat, sistem norma, dan peraturan-peraturan ialah pengertian dari enkulturasi. Enkulturas terjadi secara sekaligus, selain itu dibatasi selama masa muda tetapi ketika mereka tumbuh lebih berpengalaman mereka akan belajar bagaimana secara alami mengakui atau mengabaikan kualitas atau daya tarik masyarakat. Sesuai dengan pengertian di atas, cenderung diartikan bahwa pengajaran adalah suatu pekerjaan untuk mensosialisasikan apa yang kita kenal sebagai jalannya enkulturas atau pembudidayaan. Ini berarti bahwa setiap bayi memiliki serangkaian peralatan organik yang diperoleh yang harus diubah atau diamati agar sesuai dengan gaya hidup daerah setempat (Suharyanto, 2005).

Salah satu pendapat ahli menggambarkan “Enkulturas sebagai proses sosialisasi dan pemeliharaan norma-norma budaya warisan seseorang, termasuk nilai-nilai, gagasan, dan konsep yang menonjol, istilah enkulturas dapat membantu dalam menjelaskan secara lebih lengkap pengalaman dari individu-individu ini” (Herskovits ,dalam Bryan dan Saul, 2019). Berdasarkan definisi ini, dapat dijelaskan bahwa proses “pemeliharaan budaya” yang dijelaskan diatas mungkin lebih baik direpresentasikan dengan terminologi enkulturas yang lebih luas.

Proses enkulturas merupakan upaya membentuk tingkah laku dan sikap seseorang berdasarkan pengetahuan dan keterampilan agar setiap orang dapat memainkan perannya masing-masing. Oleh karena itu, cara pembelajaran konsep budaya merupakan perubahan perilaku peserta didik (Juanda, 2010). Uraian di atas sejalan dengan empat pilar pendidikan yang ditegaskan oleh UNESCO bahwa belajar bukan hanya untuk tahu tetap juga bagaimana belajar dapat menggiring

peserta didik untuk dapat mengimplementasikan pengetahuan yang telah didapatkan ke dalam kehidupan sehari-hari yang diakhir mempunyai tujuan untuk membangun jati diri, dan membentuk kehidupan yang harmonis.

3. Rekulturasasi Karakter Kejujuran

Misi khusus dalam pendidikan pada awalnya ialah membentuk manusia yang terlatih dan terpelajar, berilmu dan berpengetahuan. Peserta didik akan diarahkan terhadap beberapa nilai- nilai itu dalam proses pembelajaran. Secara totalitas dalam waktu panjang dari proses sosialisasi tersebut diharapkan nilai-nilai tersebut bisa membudayakan nilai- nilai terkhusus seperti nilai kejujuran tersebut dalam diri mereka. Nilai- nilai ataupun values kejujuran hendak sanggup jadi milik peserta didik, apabila ada suatu proses internalisasi di dalam tiap- tiap diri partisipan didik tersebut. Proses internalisasi itu sendiri sanggup berlangsung lewat upaya aktualisasi nilai- nilai kejujuran itu tiap hari secara selalu. Berbagai kerjasama yang tergabung dari bagian-bagian di dalamnya, baik ilmiah maupun non-ilmiah ialah pengertian dari kultur. Kultur tergambar dalam kerjasama yang dimaksud meliputi: interaksi pendidik dan peserta didik dalam siklus belajar dan koneksi pengajar dan staf pengatur, kerjasama antar peserta didik dan kerjasama pengajar dengan kepala sekolah. (Yusuf, 2000). Diantara banyaknya nilai-nilai karakter, salah satu nilai karakter yang dapat direkulturasasi adalah karakter kejujuran. Karakter kejujuran sangat mendasar sebagai tujuan penting untuk mengatasi masalah besar yang menjadi dasar kemerosotan negara Indonesia saat ini. Kualitas-kualitas ini dipandang sebagai vital dalam berbagai hal dalam bagian kehidupan. Menurut Zubaedi (2015, hlm.84) mengatakan, “Nilai kejujuran perlu mendapat perhatian yang tinggi dalam pendidikan karakter mengingat status keaslian saat ini semakin menipis. dan memudar sedangkan didalam sebuah fondasi kehidupan bagi seseorang adalah nilai kejujuran”.

Berdasarkan uraian yang telah peneliti jelaskan diatas, bahwa di dalam merekulturasasi nilai karakter kejujuran diperlukan penanaman kebiasaan nilai karakter kejujuran yang didapat melalui sebuah pesan dan kesan dari model yang dapat dicontoh dan dilihat salah satunya guru dan juga kejadian yang dialami dan dirasakan baik di dalam maupun di luar kelas akan mempengaruhi perilaku dan

mental peserta didik dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Kehadiran peserta didik di sekolah tidak sedikit berperan dalam menentukan keberhasilan pelatihan di sekolah. Membangun pembelajaran dan latihan instruktif di sekolah tidak hanya pelaksanaan struktur instruktur tetapi juga pelaksanaan belajar.

B. Kajian tentang Pendidikan Karakter

1. Pengertian Karakter

Sebuah karakter sangat dibutuhkan dalam mengembangkan sebuah konsep dalam diri setiap peserta didiknya. Seorang filsuf Yunani menegaskan bahwa karakter yang baik merupakan sebuah kehidupan yang didalamnya terdapat sikap perilaku yang baik dan selalu berkaitan dengan diri seseorang dan orang lain, sehingga berupaya melakukan hal-hal baik bagi orang lain diperlukan sebuah pengendalian diri sendiri beserta keinginan diri, dan hasrat didalam diri. Aristoteles (dalam Lickona, 2012 hlm.81). Kata karakter berasal dari bahasa Yunani *kharassein*, yang bermaksud untuk mengukir agar sebuah contoh dibingkai. Seseorang juga memiliki arti, nilai, dan nilai yang luar biasa dalam kehidupan sehari-hari. Karakter adalah keputusan yang membutuhkan pemikiran, ketabahan mental, kerja keras dan perkembangan bertahap yang dapat diprediksi. dalam penjelasan diatas bahwa karakter bisa tetpa berjalan dengan adanya sebuah kebiasaan, sejalan dengan pendapat William Bennet (dalam Lickona 2012, hlm.99) mengatakan bahwa “Bertindak sebenarnya, dengan loyal, dengan berani, dengan baik, dan dengan adil tanpa merasa tertekan oleh arah tindakan sebaliknya”. Dalam mengartikan karakter sebagai kualitas fundamental yang membentuk karakter individu, itu terbentuk karena pengaruh keturunan dan pengaruh alam, yang mengenalinya dari orang lain, dan ditunjukkan dalam cara pandang dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari (Samani dan Hariyanto, 2012, hlm 43). Hill (dalam Chrisiana, 2005) mengatakan "*Character decides someone's private considerations and somebody's action done. Great person is the internal inspiration to make the right decision, as indicated by the best quality of conduct in each circumstance*". Kalimat di atas mengandung arti “Karakter menentukan pikiran pribadi seseorang dan tindakan yang dilakukan seseorang. Karakter yang baik adalah motivasi batin untuk melakukan apa yang benar,

menurut standar perilaku tertinggi dalam setiap situasi”. Dalam penjelasan di atas karakter dapat didefinisikan sebagai identitas diri seseorang.

Dari uraian di atas cenderung dianggap bahwa pendidikan karakter menanamkan sebuah penyesuaian tentang hal-hal yang dapat diterima sehingga peserta didik melihat secara intelektual mana yang benar dan mana yang tidak benar, dapat merasakan emosional sifat-sifat yang baik dan terbiasa melakukannya. Mereka atau psikomotor (Hariyono, 2016). Karakter pada dasarnya ditujukan untuk membentuk suatu negara terhormat, baik, toleran, menyenangkan, energik, semakin berkreasi, fokus pada ilmu pengetahuan dan inovasi, yang semuanya ditanamkan dengan keyakinan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut pendapat ahli karakter dicirikan sebagai kualitas dan jumlah tanggapan terhadap diri sendiri, orang lain, atau keadaan atau karakter tertentu, etika, atribut mental. Atribut mental yang digerakkan oleh orang-orang dalam lingkaran individu akan berkembang menjadi kualitas kelompok dan lebih luas lagi menjadi kualitas sosial (Ekowarni, dalam Ghufron, 2007). Atribut mental individu akan memberikan nada dan kepribadian yang menyatu dan pada tingkat skala besar akan menjadi kualitas mental atau karakter suatu negara. Penataan kepribadian suatu negara berlanjut dengan kuat sebagai keajaiban sosial-alam (Ghufron, 2007). Berdasarkan uraian di atas, dapat dideskripsikan bahwa karakter ialah sebuah jati diri, kepribadian, dan watak yang melekat pada diri seseorang. Dari pernyataan keseluruhan mengenai pengertian karakter, peneliti menarik garis besar bahwa yang dimaksud dengan karakter merupakan suatu nilai yang mendasari terciptanya pribadi seseorang dalam mengimplementasikan sebuah perilaku atau tindakan.

Kondisi remaja saat ini yang belum mampu mempertahankan budayanya sendiri, karena terpengaruh dengan berkembangnya budaya asing. Contohnya ada berbagai pilihan sikap perilaku kenakalan remaja seperti hilangnya nilai-nilai kejujuran, kesopanan yang tidak lagi menghormati orang tua dan tidak lagi mengutamakan nilai-nilai kejujuran dalam melaksanakan aktivitas kehidupannya misalnya menghalalkan segala cara untuk menutupi sebuah kebohongan. Tindakan seperti itu tidak sesuai dengan moral dan keyakinan agama. Karakter selalu berkenaan dengan jasmani dan rohani dan karakter juga bersifat

kontekstual dan kultural, yang dimaksud dengan karakter kontekstual ialah sebuah karakter yang dibangun dengan tujuan agar mampu dalam menghadapi dan beradaptasi dengan abad 21, sedangkan karakter yang bersifat kultur dimaksud dengan karakter baik bisa muncul dengan budaya yang ditanamkan sejak dini. Makna karakter mempunyai dua istilah yang diidentikkan satu sama lain, nilai dan karakter tidak bisa dibiarkan begitu saja, dengan nilai, karakter akan terbentuk dan dengan karakter, kualitas dapat terlihat. Karakter sebagai enkapsulasi kualitas sebagai watak, tabiat atau watak seseorang yang diterima dan dimanfaatkan sebagai cara memandang, berpikir dan bertindak. Suatu nilai adalah pendorong utama, dan pembatas manusia, sehingga bisa dikatakan bahwa kualitas berjalan sebagai aturan yang menentukan keberadaan manusia yang kemudian ditampilkan dalam karakter substansial.

Lickona menegaskan bahwa karakter memiliki tiga bagian yang saling berkaitan satu sama lainnya yaitu: pengetahuan moral, perasaan moral, dan perilaku moral. Dalam hal ini Lickona menjelaskan karakter yang baik terdapat dari proses-proses seperti, mengetahui hal-hal baik, menginginkan hal yang baik, dan melakukan hal yang baik sehingga ketiga bagian tersebut tertuju dalam suatu kehidupan yang bermoral, dan membantu dalam membentuk kedewasaan moral. Lickona juga menjelaskan kalau konsep moral meliputi pemahaman moral, pengetahuan tentang nilai-nilai moral, pemikiran masa depan, penalaran moral, pengambilan keputusan, serta komponen dari pengetahuan itu sendiri. Perilaku moral meliputi hati nurani, yakin diri, empati, cinta, serta pengendalian diri. Serta kerendahan hati. Sikap terdiri dari keahlian, keinginan serta kerutinan. Integritas faktor moral seorang hendak membentuk kepribadian yang baik atau superior. Menurut Sudarminta (dalam Zubaedi, 2015 hlm.3) menjelaskan bahwa praktik pendidikan yang semestinya memperkokoah aspek karakter atau nilai-nilai kebajikan hanya bisa menciptakan berbagai sikap manusia yang sebenarnya bertolak belakang dengan apa yang sudah diajarkan. memandang keadaan saat ini dicontohkan dengan bagaimana Pembelajaran Moral Pancasila (PMP) serta agama pada masa kemudian ialah dua tipe mata pelajaran tata nilai, yang nyatanya belum sukses dalam menanamkan bermacam nilai humanisme serta moral ke dalam benak peserta didik. Terbukti dalam sebuah penelitian mengatakan materi dalam

sebuah pembelajaran agama diajarkan pada pengayaan pengetahuan (kognitif), sedangkan pembentukan dari segi sikap (afektif), dan pembiasaan (psikomotorik) sangat minim atau tidak terlihat.

Sehingga lemahnya pusat kebijakan pendidikan nasional sekarang di karenakan aspek lain dalam diri peserta didik seperti aspek sikap dan kebaikan yang kurang memperoleh perhatian dari pembuat kebijakan sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya sebuah degradasi dalam dimensi karakter ini. Moral yang mendalam di kalangan anak muda dan pemuda dianggap sebagai masalah karakter atau etika yang tidak diabaikan oleh landasan pendidikan. Meskipun demikian, dengan kenyataan yang meliputi penurunan karakter di sekitar kita mengusulkan bahwa lembaga tersebut dalam hal menumbuhkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia atau berkarakter. Hal tersebut dikarenakan institusi sekolah tentang agama dan pengajaran yang lainnya yang ketat belum berlaku dalam hal menciptakan dan membentuk karakter manusia. Meskipun melihat pengajaran yang ketat mengenai moral, dan bahkan kita bisa memahaminya, akan tetapi terjadinya kondisi kemerosotan karakter dan moral tidak lepas dari guru yang mengajar pelajaran mata pelajaran apapun harus memiliki perhatian yang kuat akan pentingnya pendidikan karakter. Untuk itu, kondisi dan fakta kemerosotan karakter dan moral dalam situasi yang sarat dengan persoalan seperti saat ini, orang tua harus tetap berusaha dengan ikhlas dan ikut serta dalam mendidik karakter anak agar dapat berpikir, bertindak, dan bertindak sesuai dengan standar yang lurus. Sekolah karakter sekarang perlu dimulai dengan menanamkan informasi dan perhatian pada anak-anak agar bertindak sesuai dengan nilai-nilai moralitas di dalam kehidupan sehari-hari. Berhasilnya proses penanaman karakter dalam diri peserta didik akan menghasilkan dan menciptakan kecerdasan moral pada anak, sehingga mereka bukan hanya berpikir dengan benar akan tetapi bertindak dan berperilaku dengan baik dan benar (Zubaedi, 2015 hlm.3).

Berdasarkan eksplorasi dari semua bangsa ini, pendidikan memiliki dua tujuan, khususnya mengarahkan usia yang lebih muda untuk menjadi cerdas dan memiliki perilaku etis (Lickona, 2012 hlm. 7). Menyingkapi hal tersebut cerdas dan berperilaku baik bukan suatu hal ya sama. Pada zaman Plato, mereka telah

menciptakan sebuah kebijakan dalam mendidik karakter pada anak setara dengan pendidikan pengetahuan, mendidik kesopanan setara dengan pendidikan kecakapan, mendidik kebaikan setara dengan ilmu pengetahuan. Menurut ahli pendidikan karakter Lickona terdapat beberapa penjelasan yang melatarbelakangi perlunya pembinaan karakter, antara lain: (1) Banyaknya usia muda yang saling menyakiti karena kurangnya penerangan dalam kebajikan, (2) Pemberian kebajikan di usia yang lebih muda merupakan salah satu unsur utama kemajuan manusia, (3) Tugas sekolah menjadi guru pribadi menjadi semakin penting ketika anak-anak mendapatkan metode pengajaran yang sedikit lurus seperti yang ditunjukkan oleh wali, masyarakat, atau perkumpulan yang ketat, (4) Masih ada kebajikan yang diakui secara umum seperti sebagai pertimbangan, kepercayaan, rasa hormat, dan kewajiban, (5) Sistem aturan mayoritas memiliki persyaratan khusus untuk instruksi moral karena pemerintah populer adalah standar untuk individu, (6) Tidak ada sesuatu yang tanpa instruksi penghargaan. Sekolah menunjukkan pelatihan bebas harga diri. Sekolah menunjukkan penghargaan setiap hari melalui rencana atau tanpa rencana, (7) Tanggung jawab dalam pelatihan karakter sangat penting ketika kita membutuhkan dan terus menjadi instruktur yang dapat diterima, dan (8) Instruksi orang yang layak membuat sekolah lebih dibangun, diperhatikan di mata publik.

2. Pengertian Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter ialah proses pemberdayaan serta pembudayaan nilai-nilai jati luhur bangsa dalam kawasan satuan pembelajaran ialah di sekolah, area keluarga, serta area publik. Uraian diatas senada dengan pendapat menurut Williams & Schnaps (dalam Zubaedi, 2015) menjelaskan bahwa yang dimaksud pendidikan karakter adalah *“Any conscious methodology by which school faculty, frequently in conjunction with guardians and local area individuals, help kids and youth become mindful, principled and capable”*. Yang dimaknai bahwa pendidikan karakter adalah setiap pendekatan yang disengaja, baik di sekolah, keluarga dan anggota masyarakat, serta dengan adanya pendidikan karakter membantu menciptakan peserta didik yang peduli, berprinsip, dan bertanggung jawab.

Pendidikan karakter telah menjadi sebuah permasalahan di berbagai negara, tak terkecuali di dalam negara Indonesia. Pendidikan karakter ialah suatu bagian yang sangat mendasar dan menjadi tuntutan dan tugas bagi setiap sekolah, akan tetapi pelaksanaan hal tersebut sangat kurang mendapatkan perhatian baik di lingkungan akademis dan non akademis. Menurut Zubaedi (2015, hlm.14) Pengajaran karakter dicirikan sebagai tujuan untuk semua komponen sekolah untuk mendorong kemajuan pribadi yang ideal yang diuraikan sebagai upaya terarah kami dari semua elemen kehidupan sekolah untuk membuat kemajuan pribadi yang ideal sebagai upaya sadar kita dari semua komponen kehidupan, sekolah diuraikan untuk membangun kemajuan pribadi yang ideal. Uraian diatas jika peneliti menarik kesimpulan bahwa dalam mendukung dan mengusahakan dalam membentuk peserta didik, lembaga sekolah wajib mengikutsertakan dan memasukan seluruh *stakeholder* baik di sekolah maupun di aspek dalam isi kurikulum.

Menurut Kusuma (dalam Juliardi,2015) Pendidikan karakter adalah jenis tindakan manusia di mana di dalamnya ada kegiatan instruktif yang berfokus pada setiap generasi yang akan datang. Alasan pengajaran karakter adalah untuk membingkai akhir kepribadian peserta didik pada tindakan yang berkelanjutan dan berlangsung secara menyeluruh yang bertujuan nanti nya akan melatih kemampuan peserta didik demi menuju kearah hidup yang lebih baik (Juliardi, 2015). Pengenalan pengajaran karakter dapat diartikan sebagai sebuah karya untuk membuat dunia lain yang optimal. Motivasi mendasar di balik pendidikan karakter adalah untuk membentuk pribadi yang sebenarnya, mengingat penilaian terhadap individu dan karakter juga dapat memberikan solidaritas posisi dalam setiap keadaan adalah makna karakter. Pelatihan karakter dapat digunakan sebagai panggung untuk menaklukkan pengalaman yang terus berubah untuk membentuk karakter yang solid untuk setiap peserta didik. Untuk situasi ini cenderung terlihat bahwa motivasi di balik pendidikan karakter adalah untuk membingkai mentalitas yang dapat membawa kita maju tanpa bertentangan dengan standar keseluruhan. Pendidikan karakter diterapkan sebagai posisi sosialisasi karakter yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik. Menurut Zubaedi (2015, hlm.25) ditegaskan bahwa pendidikan karakter adalah pendidikan karakter selain yang pada dasarnya

merupakan program yang diselenggarakan di sekolah yang bertujuan untuk membina pribadi dan karakter peserta didik dengan menghayati kualitas dan keyakinan daerah sebagai kekuatan etis dalam kehidupan mereka melalui keaslian, ketergantungan, disiplin, dan kerjasama. yang menekankan pada ruang emosional (sentimen atau mentalitas) tanpa meninggalkan wilayah intelektual (penalaran objektif), dan wilayah keahlian (kemampuan, berbakat dalam menyiapkan informasi, menawarkan sudut pandang, dan kolaborasi).

Pendidikan karakter merupakan suatu bagian dari upaya untuk membentuk karakter bangsa yang ditujukan untuk di implementasikan. Pendidikan karakter sejauh substansi, itu setara dengan instruksi orang tua, sebagai cara untuk meluncurkan perbaikan utama, karena membawa perubahan individu ke fondasi yang mendasarinya. Sesuai dengan hal tersebut di atas, Zubaedi mengungkapkan bahwa keluarga adalah dasar dari pendidikan karakter, sehingga tidak ada yang salah dengan keadaan darurat yang terjadi di Indonesia saat ini dapat dilihat sebagai kesan kekecewaan pelatihan instruktif di dalam keluarga.

Menurut Hasan dkk (dalam Zubaedi, 2015) mengatakan bahwa pendidikan karakter mempunyai tiga kapasitas prinsip. Pertama-tama, kapasitas, dan pergantian peristiwa yang diharapkan. Pendidikan karakter memiliki kapasitas untuk membentuk dan membina kemampuan peserta didik untuk bertindak baik dan bertindak sesuai dengan cara berpikir hidup. Kedua, kapasitas kemajuan dan peningkatan. Pendidikan karakter berupaya meningkatkan dan menggarap tugas keluarga, satuan persekolahan, daerah, dan pemerintah untuk ikut serta dan bertanggung jawab dalam membina kemampuan penduduk dan kemajuan menuju negara yang tingkat tinggi, mandiri, dan sejahtera. Ketiga, saluran bekerja. Pendidikan budi pekerti berusaha untuk mengetahui cara hidup negara yang sebenarnya dan menyalurkan cara hidup berbagai negara yang tidak sesuai dengan kualitas sosial dan karakter negara yang megah. Kapasitas ketiga ini dibantu melalui: (1) inisiasi Pancasila sebagai cara berpikir dan falsafah negara, (2) pengukuhan kualitas dan standar yang dilindungi UUD 1945, (3) tanggung jawab publik Negara Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), (4) perluasan nilai keanekaragaman sesuai asal usul Bhineka Tunggal Ika, dan (5) keunggulan dan intensitas bagi negara. Sehingga penjabaran mengenai pendidikan

karakter yang telah di jabarkan oleh peneliti, peneliti menarik kesimpulan bahwa penggabungan nilai-nilai karakter dalam setiap mata pelajaran, ternyata sangat penting bagi persiapan peserta didik untuk menghadapi setiap masalah dalam kehidupan. kehidupan yang penuh polemik seperti sekarang ini, sehingga pendidikan karakter sangat penting untuk di ajarkan kepada peserta didik dengan penanaman pengetahuan dan kesadaran kepa anak akan bagaimana bertindak sesuai dengan nilai-nilai moralitas. Sehingga apabila di dalam lembaga informal maupun non sformal mampu menerapkan mengenai karakter yang baik ke setiap peserta didik maka akan menghasilkan sikap perserta didik yang jujur, bertanggung jawab.

Dari pernyataan keseluruhan mengenai pengertian pendidikan karakter, peneliti menarik kesimpulan bahwasanya pendidikan karakter adalah suatu tindakan yang mendidik kepada generasi muda selanjutnya yang harus diterapkan dan diimplementasikan agar tercapainya pendidikan karakter yang optimal.

3. Tahapan Pendidikan Karakter

Menurut Zubaedi (2015 hlm. 198) mengatakan tingkatan karakter adalah interaksi yang dilakukan secara terus-menerus, karakter seharusnya merupakan upaya hidup bukan hasil atau item sehingga ukuran pelatihan seseorang tidaklah sulit untuk dibuat bagi setiap individu karena banyaknya komponen yang mempengaruhi prestasi dalam menjadikan pribadi manusia. Sosialisasi dan pelatihan anak-anak yang diidentikkan dengan nilai-nilai kehati-hatian, baik di dalam keluarga, di sekolah, maupun di luar lingkungan sangat penting dalam membentuk kepribadian seorang anak. Dengan tujuan bahwa kekuatan pusat selama waktu yang dihabiskan untuk membangun pribadi umumnya dikendalikan oleh realitas sosial emosional yang dialami oleh individu dan realitas sasaran yang dialami di luar orang tersebut dalam membentuk karakter individu.

Megawangi (dalam Zubaedi,2015 hlm.110) menyebutkan bahwa pendidikan karakter perlu dilakukan sejak usia dini. Hal ini sesuai dengan anak adalah gambaran awal manusia yang menjadi manusia di mana nilai-nilai kebajikan selalu berkembang secara perlahan tapi pasti. Dengan demikian, apabila nilai-nilai dasar kebajikan gagal untuk diimplementasikan dalam diri anak usia

dini, maka anak tersebut akan menjadi orang dewasa yang tidak mempunyai nilai-nilai kebajikan. Dengan adanya pendidikan karakter akan mendukung lahirnya peserta didik yang baik. Peserta didik yang tumbuh dengan karakter yang baik akan selalu berusaha untuk melakukan semuanya dengan baik dan benar. Menurut Alwisol (dalam Zubaedi,2015) mengatakan bahwa karakter manusia berkembang dan diciptakan oleh pengaturan sosial (*social arrangements*) di mana masyarakat menciptakan karakter pada anak melalui pendidik dan orang tua agar berperilaku sesuai dengan yang dikehendaki oleh masyarakat. Karakter yang dibentuk secara sosial meliputi *accepting, preserving, taking, exchanging, dan biophilous*. Dengan proses menerima, melestarikan, pengambilan, bertukar.

Menurut T.Lickona, E.Schapas, dan Lewis (dalam Zubaedi,2015) menggambarkan bahwa pengajaran karakter harus didasarkan pada sepuluh prinsip sekolah yang menyertainya:

1. Memajukan kualitas moral dasar sebagai premis karakter;
2. Membina orang secara menyeluruh sehingga mencakup renungan, sentimen, dan perilaku;
3. Memanfaatkan cara yang tajam, proaktif, dan layak untuk menghadapi pembangunan karakter;
4. Buatlah area sekolah yang sadar akan lingkungan;
5. Berikan kebebasan kepada peserta didik untuk menunjukkan perilaku yang pantas;
6. Memiliki ruang lingkup untuk analisis pengujian yang membuat semua peserta didik berkualitas, dan membantu mereka berhasil;
7. Membuat kemajuan menuju pengembangan inspirasi diri pada peserta didik;
8. Bekerja semua staf sekolah sebagai area lokal etis yang berbagi tanggung jawab mengenai pelatihan karakter dan setia pada kualitas dasar yang sama;
9. Adanya pembagian administrasi yang baik dan bantuan yang luas dalam drive pelatihan karakter; dan
10. Lingkungan sebagai kaki tangan dalam upaya pembentukan karakter.

Menurut Zubaedi (2015, hlm.110) menggambarkan peningkatan karakter sebagai sebuah siklus yang terbagi menjadi empat fase: pertama, pada usia ini dikenal sebagai fase penataan karakter; kedua, di masa muda, disinggung sebagai

tahap kemajuan; ketiga, di masa dewasa, disinggung sebagai tahap penyesuaian; dan keempat, di usia lanjut, disinggung sebagai tahap kebijaksanaan. Pada usia remaja atau pada tahap pengembangan, *World Health Organization (WHO)* telah menetapkan batasan usia remaja ialah 10-20 tahun. Masa remaja merupakan masa dimana terjadinya suatu perubahan dari masa kanak-kanak ke masa kehidupan orang dewasa, sehingga biasanya masa usia remaja dapat dikatakan dengan masa pencarian jati diri (Wahidin, 2017). Mengingat remaja ialah generasi penerus yang akan meneruskan keberlangsungan bangsa haruslah mempersiapkan dengan optimal pengembangan karakter didalam diri remaja tersebut. Salah satu upaya dalam membentuk karakter dalam diri usia remaja ialah dengan memasukan nilai-nilai agama sehingga dimasa usia remaja memiliki kemampuan memilah antara perilaku yang baik dan perilaku yang buruk, dan yang patut dan tidak patut dilaksanakan. Menurut E.H.Erikson (dalam Wahidin,2017) pada usia remaja harus menemukan identitas jati diri, dalam keadaan demikian dalam usia remaja memerlukan seorang tokoh atau model yang menjadi panutan teladan bagi remaja tersebut misalnya tokoh masyarakat yang dianggap berhasil dalam kehidupan. Berdasarkan uraian diatas yang memegang kendali besar akan pengembangan dan pembentukan karakter ialah orang tua misalnya dapat membantu remaja dengan mengikutsertakan peranan agama sehingga anak dapat tersadarkan dan berkeyakinan dengan agama yang telah diperolehnya.

Kondisi dalam lingkungan keluarga seharusnya diciptakan secara seimbang dengan suasana yang ada disekolah. Terjalannya komunikasi antar anggota keluarga sebaiknya bersifat terbuka serta dilandasi dengan rasa kasih sayang yang tulus. Tidak hanya itu nilai- nilai positif yang hendak dibesarkan di sekolah, serta pula hendak dibesarkan di area keluarga, hendaknya ialah hasil dialog pihak sekolah dengan orang tua peserta didik. Dengan demikian pengembangan contoh-contoh terpuji pekerjaan orang tua dalam iklim keluarga dengan pekerjaan pendidik di iklim sekolah diandalkan untuk memiliki pilihan untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapi hari ini untuk mengatasi masalah di kemudian hari. karena masalah besar harus ditangani bersama dan dengan koordinasi yang baik (Wahidin, 2017).

4. Karakter Kejujuran

Kejujuran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dituliskan bahwa kejujuran adalah kelurusan hati dan ketulusan hati. Sedangkan karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang dimana karakter tersebut dapat membedakan seseorang dari yang lain. Maka berdasarkan uraian diatas yang dimaksudkan karakter kejujuran adalah sifat ketulusan dan kelurusan hati yang dimiliki oleh pribadi seseorang yang membedakan orang tersebut dari orang lain. Menurut Zubaedi (2015, hlm.74) perilaku yang bergantung pada upaya untuk bertindak secara alami sebagai individu yang secara umum dapat dipercaya dalam kata-kata, kegiatan, dan pekerjaan adalah arti dari kepribadian yang dapat dipercaya. Kepribadian amanah harus dipusatkan dalam pendidikan karakter dengan alasan bahwa kepribadian keaslian saat ini memudar dan pembentukan kehidupan individu, keluarga, masyarakat, dan bangsa adalah dari kepribadian keaslian. Bagian penting dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tak henti-hentinya otoritas publik tentang pendidikan karakter di sekolah adalah dalam membina kepribadian amanah. Berbagai teknik dihadirkan untuk membantu pencapaian pembinaan karakter yang diselenggarakan melalui organisasi sekolah (Murdiono, 2016).

Wynne & Kalidjernih (dalam Murdiono, 2016) menjelaskan bahwa di dalam karakter kejujuran selalu berkaitan dengan perilaku manusia yang baik, benar dan membawa sikap ke arah yang positif. Dengan demikian setiap karakter manusia dapat dilihat dalam aktivitasnya sehari-hari. Konsep akar dari sebuah karakter kejujuran adalah sikap dan perilaku yang terimplementasikan dan diikuti dengan hati yang lurus atau ikhlas, berbuat sesuai kebenaran dan berbicara sesuai dengan kenyataan, dan berbuat sesuai bukti dan kebenaran yang dapat dibuktikan dan dilihat oleh mata, uraian diatas senada dengan pendapat Mahmud yang menjelaskan bahwa dalam pengertian yang lebih luas, orang yang memiliki karakter jujur adalah orang yang dapat berperilaku sesuai lahir dan batinnya (Murdiono, 2016).

Krisis moral mengenai karakter kejujuran peserta didik saat ini memperlihatkan bahwa karakter kejujuran yang sudah tidak lagi menjadi fondasi dalam suatu realitas kehidupan kebangsaan dan kenegaraan, maka menjadi sangat

penting dan krusial untuk mengimplementasikan karakter terutama karakter kejujuran melalui proses pendidikan. Dalam hal ini, pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diharapkan dapat menjadi wadah dalam pembangunan kembali karakter kejujuran yang mulai terjadinya penurunan ini. melihat misi yang diperankan oleh Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah sebagai pendidikan karakter. Berdasarkan uraian diatas mengenai pengertian karakter kejujuran, peneliti menarik kesimpulan bahwa yang dimaksudkan dengan karakter kejujuran adalah perilaku di dalam diri manusia yang berkaitan dengan kelurusan dan ketulusan hati sehingga karakter kejujuran yang membedakan individu satu dengan yang lainnya.

C. Kajian tentang Kejujuran

1. Pengertian Kejujuran

Menurut Albert Hendra Wijaya (dalam Emosda, 2013) bahwa sebuah kejujuran dan kepercayaan setiap kali ditandai dengan standar adalah untuk mengakui, mengatakan atau memberikan data yang sesuai dengan kenyataan dan kenyataan. Salah satu orang yang paling dihargai dalam hidup adalah kepercayaan. Keaslian adalah perilaku yang digerakkan oleh seseorang dalam mengakui, mengatakan atau memberikan data yang sesuai dengan kenyataan dan kebenaran. Orang kadang-kadang gagal mengingat nilai kepercayaan itu sendiri.

Menanamkan sisi positif dari iklim pembelajaran, adalah hal yang sederhana. Hal ini benar-benar diidentikkan dengan persoalan gaya hidup yang terpuji dan seimbang, materialistis, dan dekaden yang telah mengambil sisi terbalik dari kejujuran, ketenangan, keuletan, dan mentalitas terhormat lainnya yang telah menjadi teladan seorang pendidik hingga saat ini. Masalah moral masih menjadi masalah yang sulit bagi negara ini.khususnya kejujuran. Metode pendidikan nasional akibat belum lepas dari cengkraman politik kekuasaan berdampak terhadap stabilitas pembangunan karakter (*character building*) di seluruh kegiatan kehidupan.

Secara fungsional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ditegaskan bahwa misi utama perbaikan masyarakat adalah terwujudnya insan negara yang kokoh, serius, bermartabat, dan bermoral yang

berlandaskan Pancasila, yang digambarkan oleh pribadinya. dan perilaku manusia dan individu Indonesia yang tegas, bertakwa dan takut akan Tuhan Yang Maha Kuasa, berwawasan luas, toleran, partisipasi bersama, jiwa enerjik, dinamika pergantian peristiwa dan ilmu pengetahuan dan inovasi. Sangat disesalkan kondisi sekarang dimana guru yang dikatakan sebagai pendidik memiliki keraguan dalam memberikan bimbingan moral secara langsung. Seharusnya guru menciptakan kembali sebuah kondisi yang bermoral dimana mereka dapat berbicara secara langsung dan tidak bertele-tele mengenai pemahaman mana yang benar dan mana yang salah. Timbul sebuah pernyataan bahwa sebuah nilai moral seperti kejujuran akademik merupakan hal yang sangat penting. Menurut Lickona beliau menegaskan sejatinya jika terjalin hubungan yang baik antara guru dan peserta didik, kemudian para peserta didik ingin tahu apa yang dipikirkan instruktur mereka. Adapun kejujuran, pendidik harus dapat memberi tahu peserta didik mereka atau membimbing mereka melalui percakapan dan kemudian memahami bahwa menyontek itu tidak benar karena:

- a. Kecurangan dapat mengurangi kepercayaan diri karena Anda tidak akan pernah puas dengan apa yang anda dapatkan dari kecurangan
- b. Kecurangan sama sekali tidak benar, dengan alasan menipu orang lain. Anda melihat lebih banyak dari apa yang Anda lakukan.
- c. Curang akan merusak kepercayaan instruktur ketika anda dapat melakukan apa pun yang ingin Anda lakukan. Selain itu, menghubungkan semua koneksi kepercayaan antara seorang pendidik dan peserta didik kelas lainnya.
- d. Kecurangan adalah di luar batas untuk individu lain yang sah.
- e. Jika Anda menyontek di sekolah Anda sekarang, Anda akan melihatnya dengan mudah untuk mengulanginya dalam situasi yang berbeda dalam kehidupan Anda sehari-hari bahkan dengan orang-orang terdekat anda.

Lickona (2012, hlm.121) menjelaskan tentang bagaimana jika mereka pernah melakukan kecurangan sebagai berikut:

Ya atau tidak saya melakukan kecurangan, hal tersebut merupakan hal yang tidak relevan dengan apakah hal tersebut benar atau salah. Seperti kebanyakan orang, saya dahulu pun membuat kesalahan ketika muda. Kamu harus memikirkannya baik-baik, tentang apa itu kebenaran, apa itu rasa hormat terhadap diri sendiri dan orang lain, dan bertingkah lakulah berdasarkan kebenaran itu.

Berbicara mengenai permasalahan kebohongan kepada peserta didik akan membantu mereka berpikir tentang apa yang dimaksud dengan kejujuran, mengapa hal tersebut sangat penting untuk dibahas dan akan membentuk pikiran peserta didik bahwa dalam nilai kejujuran dan kualitas moral merupakan tantangan besar yang harus dilalui. Sebuah moral kejujuran tidak akan menjadi berkualitas bagi para penerus bangsa jika hal tersebut tidak dianggap penting oleh orang dewasa. McGuffey (dalam Lickona, 2012 hlm.341) mengemukakan bahwa Kelihaihan terbaik, memiliki sifat-sifat hebat akan mendapatkan keuntungan hidup, dan bijaksana adalah cara paling pasti menuju kebahagiaan. merupakan penjelasan dari kejujuran. Sehingga dari uraian di atas peneliti menarik sebuah kesimpulan bahwa pertama yang harus kita lakukan sebagai pendidik adalah menyukai kebaikan itu sendiri serta mencoba dan menggambarkan sesuatu dengan benar secara mendasar sehingga peserta didik akan mengikuti perjalanan dari kebaikan itu sendiri.

Maka dari itu penting untuk semua tingkatan lembaga sekolah dalam memberikan situasi dan kondisi dimana siap membina kepribadian peserta didik agar memiliki watak yang tulus. Sekolah dasar merupakan wadah bagi anak-anak sejak awal (8-13 tahun) dimana setiap pendirian sekolah memiliki dampak yang signifikan dalam upaya membentuk watak peserta didik yang sejati sejak awal, hal ini harus dilakukan melalui pendidikan karakter. Pada dasarnya pendidikan karakter dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang positif yang dilakukan oleh pengajar yang akan mempengaruhi kepribadian peserta didik yang di didiknya (Reffiane et al., 2016).

Menurut Kusmiyati (dalam Refianne dkk, 2016) mengatakan bahwa “Salah satu sikap yang dimana perbuatannya, ucapannya yang dikeluarkan dari hati, sesuai dengan fakta ialah pengertian dari Kejujuran”. Dari pendapat yang telah diuraikan di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa kejujuran adalah suatu sikap yang menunjukkan bahwa kegiatannya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa kendali melalui kebohongan.

2. Indikator Karakter Kejujuran

Nilai dan indikator karakter kejujuran dalam pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.1

Indikator Karakter Kejujuran

Nilai Karakter	Indikator dalam Pengembangan Karakter Kejujuran
Kejujuran	<ol style="list-style-type: none">1. Transparansi nilai yang diberikan oleh guru kepada peserta didik.2. Peserta didik mengungkapkan keinginannya atau hal yang masih belum dimengerti dan dipahami selama pembelajaran daring3. Jujur dalam melakukan pengerjaan tugas yang diberikan oleh guru di masa pandemi dengan sungguh-sungguh4. Tidak menyalin hasil jawaban teman saat mengerjakan tugas yang diberikan pada saat pembelajaran daring5. Tidak menyalin jawaban dari sumber internet tanpa melakukan <i>paraprashe</i> sebelumnya6. Mengirimkan bukti daftar hadir berupa screenshot kehadiran dikelas <i>virtual</i>

Sumber : Sa'id Hawwa (dalam Juliana,2015)

3. Implementasi Karakter Kejujuran

Implementasi menurut Harsono (dalam Nugroho,dkk 2016) mengartikan bahwa implementasi ialah cara dalam menerapkan kebijakan menjadi sebuah tindakan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Nurdin dan Usman yang mengatakan bahwa implementasi bukan hanya aktivitas akan tetapi merupakan sebuah kegiatan yang terencana untuk mencapai sebuah tujuan kegiatan. Implementasi karakter kejujuran ini akan bertujuan kepada pembentukan karakter dalam diri peserta didik. Proses yang dilalui pada tahap implementasi yaitu melalui proses pembudayaan dan pemberdayaan. Proses ini melalui tiga pilar pendidikan, yakni satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Pada masing-masing pilar ada dua pendekatan, intervensi dan habituasi. Pada intervensi,

dikembangkan suasana interaksi belajar mengajar, proses pembelajaran yang sengaja dirancang untuk mencapai tujuan pembentukan karakter dengan program kegiatan yang terstruktur. Dalam hal ini peran guru menjadi vital. Pendekatan habituasi dilakukan dengan menciptakan kondisi yang kondusif, dan dengan berbagai penguatan yang memungkinkan peserta didik, baik di sekolah, keluarga, dan di lingkungan masyarakatnya membiasakan diri berperilaku yang baik seperti yang telah dipraktikkan melalui proses intervensi (Hartono, 2014). Bentuk dari implementasi nilai karakter yang ditujukan kepada peserta didik melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah untuk memberikan teladan dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, seperti halnya menggabungkan dan menghubungkan nilai-nilai pribadi yang tertulis dalam Standar kompetensi (SK). Selanjutnya, kompetensi dasar (KD) dalam latihan pembelajaran peserta didik.

Kondisi pandemi virus Corona saat ini menjadi kendala bagi dunia sekolah, khususnya pendidikan formal dengan tujuan akhir membentuk pribadi peserta didik. Pembelajaran yang dominan tidak dilakukan secara dekat dan personal, sehingga menjadi penghalang bagi guru selama waktu yang digunakan untuk melaksanakan pembelajaran karakter. Dimasa pandemi pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan mengenai Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau juga dapat disebut dalam jaringan (*daring*), hal tersebut merupakan solusi dalam mengatasi permasalahan pembelajaran di masa pandemi.

Strategi pembelajaran jarak jauh tentu bukan sesuatu yang sederhana untuk dilakukan. Pendidik diperlukan untuk bergerak secara teratur mencari cara untuk online agar pembelajaran dapat tetap berjalan selama pandemi *Coronavirus*. Banyak kendala yang dihadapi oleh para pendidik dalam melaksanakan pendidikan karakter, khususnya kepribadian amanah. Melalui pembelajaran internet ini, pendidik yang tidak bisa menyaring secara lugas sikap dan karakter masing-masing peserta didik menjadi kendala terbesar. Banyaknya kecurangan yang terjadi pada saat pembelajaran daring ini karena kurangnya pengawasan sehingga menciptakan kesempatan bagi peserta didik untuk melakukan kecurangan dengan dalih peserta didik tidak dapat memahami materi dengan baik karena sistem pembelajaran yang daring. Untuk mengatasi kondisi tersebut

seorang guru harus mampu memperhatikan minat dan gaya belajar apa yang disukai oleh peserta didik. Untuk mengukur dan mengimplementasikan pendidikan karakter kejujuran guru dapat memberikan latihan soal yang berbasis sebuah analisis atau menalar yang dimana jawaban tersebut akan bisa didapatkan dari hasil olah pikir peserta didik itu sendiri sehingga hal tersebut dapat mengurangi sikap ketidakjujuran peserta didik.

Dalam mengimplementasikan pengembangan karakter jujur peserta didik dibutuhkan kerja sama yang selaras antar orangtua, guru dan peran masyarakat sekitarnya dengan melalui pembiasaan dan perlakuan/*treatment*. Pembiasaan ialah suatu tindakan yang sering kali terulang di kehidupan sehari-hari yang terimplementasikan dalam tingkah laku seseorang melakukan sesuatu (Batubara, 2015). Sehingga apa yang dilakukan oleh seseorang merupakan suatu jalan dalam melakukan pembiasaan. Dalam penyelenggaraan pembiasaan perlu memperhatikan beberapa prinsip. Menurut Henry C. Ellis (dalam Batubara, 2015) prinsip pembiasaan adalah sebagai berikut:

1. *Acquisition* (Perolehan) ialah kegiatan yang dibentengi sedikit demi sedikit begitu juga sebaliknya.
2. *Extinction* (Pemadaman) berkurangnya kekuatan reaksi yang semakin tidak terdeteksi sampai menghilang.
3. *Spontaneous Recovery* (Pengembalian Spontan) ialah pengembalian tanpa kendala yang menunjukkan munculnya kembali reaksi yang telah tertahan. Ini menunjukkan bahwa kecenderungan perilaku masih ada meskipun reaksi telah dihilangkan.
4. *Generalization* (Generalisasi) ialah belajar dalam satu kondisi yang dapat dikumpulkan dalam kondisi yang berbeda. Sejalan dengan itu pedoman penting adalah bahwa suatu kegiatan dipelajari dan ada peningkatan lain seperti itu, itu akan menghasilkan kegiatan serupa.
5. *Discrimination* (Pembedaan) ialah prosedur pembelajaran untuk bereaksi atau bertindak secara berbeda terhadap peningkatan sebanding yang disebut pemisahan dorongan. Siklus ini adalah tipe esensial dari semua pembelajaran. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pemisahan drive antara lain

konsistensi, komparabilitas, dan pengukuran signifikansi. Semakin menonjol tingkat kemiripannya, semakin sulit bagi individu untuk mengenalinya.

6. *Differentiation* (Perbedaan) ialah interaksi yang sebanding yang diperkuat secara khas adalah pemahaman tentang kontras. sehingga untuk situasi ini satu reaksi dikuatkan sedangkan reaksi lainnya dibatasi.

Berdasarkan deskripsi yang telah peneliti uraikan mengenai pembiasaan peneliti menarik kesimpulan bahwa suatu pembiasaan sangat di butuhkan dalam proses pembelajaran khususnya dalam pembentukan karakter peserta didik. Seorang peserta didik akan melakukan kebaikan jika mendapatkan sebuah stimulus positif dari masing-masing lingkungannya menurut prinsip yang diuraikan diatas.

Treatment menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah perlakuan. Jadi peneliti menarik garis besar bahwa yang maksudkan dengan *treatment* ialah bagaimana cara guru dalam memperlakukan peserta didiknya. Sebuah perlakuan/ *treatment* sama pentingnya dalam pembentukan karakter peserta didik. Sebagaimana guru memberikan perlakuan intensif yang positif terhadap peserta didik dalam proses pembelajaran yang terlihat dalam bentuk menunjukkan kepedulian merupakan bagian penting dalam rencana pengembangan bagi perilaku peserta didik. Menurut Lickona (2012, hlm 112) dikatakan bahwa pendidik dapat memiliki kekuatan dalam menancapkan harga diri peserta didik, harus dengan tiga metode atau obat-obatan, antara lain:

1. Pendidik dapat menjadi wali yang sukses, mencintai dan menghargai peserta didik, membantu mereka agar berhasil di sekolah. membangun kepastian mereka, dan menyebabkan mereka mendapatkan apa yang baik dengan melihat cara instruktur memperlakukan mereka dengan moral yang besar.
2. Pendidik dapat menjadi teladan, menjadi individu bermoral tertentu yang menjunjung tinggi rasa hormat dan kewajiban, baik di dalam maupun di luar kelas. Pendidik juga dapat menjadi model dalam mengidentifikasi masalah dengan etika dan koneksi mereka, khususnya dengan menunjukkan moral mereka dalam bertindak di sekolah dan dalam keadaan mereka saat ini.
3. Pendidik dapat menjadi pelatih moral, memberikan bimbingan dan arahan yang baik melalui klarifikasi, percakapan kelas, narasi, menawarkan inspirasi, dan

memberikan kritik restoratif ketika peserta didik melakukannya tanpa bantuan orang lain.

Berdasarkan uraian mengenai perlakuan yang harus dilakukan oleh guru, tentu saja tidak semua guru dapat menggunakan cara tersebut dalam memperlakukan peserta didiknya. Beberapa guru memperlakukan peserta didiknya dengan kurang baik sehingga menghilangkan kepercayaan diri peserta didiknya. Walaupun demikian banyak juga guru-guru yang hebat dalam menjadi model yang baik bagi peserta didiknya untuk membangun dan mengembangkan karakter terutama karakter kejujuran terhadap peserta didiknya.

Implementasi pendidikan karakter kejujuran melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan juga dapat dilaksanakan dengan cara pendidikan karakter harus terintegrasi pada setiap materi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Setiap materi diberi bobot dalam penguatan pendidikan karakter terutama penguatan mengenai karakter kejujuran. Bukan hanya terintegrasi dalam materi pembelajaran akan tetapi dapat diimplementasikan perilaku karakter kejujuran melalui apersepsi pada kegiatan sehari-hari peserta didik seperti melalui contoh memperhatikan perilaku peserta didik yang mulai menyimpang dari karakter kejujuran atau memberi tugas sehingga secara langsung maupun tidak langsung peserta didik belajar berbagai perilaku tentang nilai karakter bersama peserta didik lainnya.

D. Kajian tentang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

1. Pengertian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang menitikberatkan pada pembangunan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang arif, berbakat, dan berkepribadian sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 (Nurmanita, 2020). Seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan tersebut, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini sering disebut *civic education*, *citizenship education*, bahkan ada yang menyebut sebagai pendidikan demokrasi.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diambil dari bahasa Inggris *Civic Education*, yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Pendidikan Kewargaan dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraannya oleh sebagian pakar. Soemantri (dalam Juliardi, 2015) memberikan ciri-ciri mengenai Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yaitu:

- a. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah kegiatan yang termasuk seluruh program sekolah
- b. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan termasuk berbagai macam kegiatan mengajar yang dapat menumbuhkan hidup dan perilaku yang lebih baik dalam masyarakat demokratis
- c. Dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan termasuk pula hal-hal yang pengalaman, kepentingan masyarakat, pribadi dan syarat-syarat obyektif untuk hidup bernegara.

Menurut Edmonson (dalam Pratiwi dan Siswanto, 2020, hlm 24) substansi PPKn secara konsisten dicirikan sebagai penyelidikan pemerintah dan kewarganegaraan yang diidentikkan dengan komitmen, hak, dan keuntungan warga. Dari berbagai anggapan di atas, sangat dapat dimaklumi bahwa Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang menekankan pada penataan warga yang memahami dan dapat menyelesaikan hak-hak istimewa dan komitmennya sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bermaksud untuk merangkai (*character building*) masyarakat Indonesia, yang meliputi:

- a. Membingkai kemampuan partisipatif warga yang berkualitas dan dapat diandalkan dalam eksistensi negara dan negara.
- b. Menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, dinamis, mendasar, dan berbasis popularitas, namun memiliki ikrar untuk tetap menjaga solidaritas dan amanah negara.

Pengertian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menurut C.S.T Kansil (dalam Suharyanto, 2013) bahwa: "Mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk menciptakan dan melindungi nilai keluhuran moral dan budi adalah mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang ditetapkan dalam tata kehidupan negara Indonesia yang diandalkan untuk menunjukkan

perilaku dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik baik sebagai manusia maupun sebagai individu masyarakat yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha kuasa". Sebagaimana pendapat ahli yang mengemukakan bahwa tujuan dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah memberikan informasi dan pemahaman yang benar, menanamkan pemahaman dan menancapkan pola pikir (*thinking design*) sesuai Pancasila dan manusia (karakter) Indonesia, menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik, keakraban dengan anak-anak, warga dan warga sekitar. Indonesia untuk secara konsisten menjaga dan menjaga nilai-nilai Pancasila, memberikan inspirasi dalam setiap perilaku sesuai dengan kualitas dan standar Pancasila (Simorangkir, dalam Suharyanto, 2013).

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada masa pergantian pemerintahan, hingga memasuki masa pembaruan, program pendidikan yang diterapkan masih berupa rencana pendidikan 1994 dengan nama Pancasila dan Instruksi Kewarganegaraan. Untuk mengubah perbaikan kerangka waktu perubahan pada tahun 1999 dilakukan dengan menampilkan diagram-diagram dengan nama yang baik, khususnya Pancasila dan Kewarganegaraan, kemampuan untuk memahami, menghayati, dan meyakini kelebihan Pancasila sebagai pedoman bertindak dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dapat diandalkan. juga, dapat diandalkan dan memberikan kapasitas untuk belajar lebih lanjut (Suharyanto, 2013).

2. Ruang lingkup Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan diatur dalam Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk pendidikan dasar dan menengah secara umum meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, sumpah pemuda, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara, 14 sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan.

- b. Norma, hukum dan peraturan, meliputi tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional.
- c. Hak Asasi Manusia, meliputi hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, pemajuan penghormatan dan perlindungan HAM.
- d. Kebutuhan warga negara, meliputi hidup gotong royong, harga diri sebagai masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara.
- e. Konstitusi negara, meliputi proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi.
- f. Kekuasaan dan politik, meliputi pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintah pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi.
- g. Pancasila, meliputi, kedudukan pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, proses perumusan pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari, pancasila sebagai ideologi terbuka.
- h. Globalisasi, meliputi: globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional, dan mengevaluasi globalisasi.

Mencermati luasan Pancasila dan Kewarganegaraan di atas, disadari bahwa materi yang terkandung dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan meliputi antara lain kualitas materi, standar dan pedoman yang sah yang mengatur perilaku warga negara, sehingga peserta didik diandalkan untuk memiliki pilihan untuk melatih materi ini dalam kehidupan sehari-hari yang teratur.

3. Tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah untuk memimpin peserta didik dalam membentuk karakter mereka sebagai manusia seutuhnya, ini tergantung pada kenyataan rahasia, bahwa peserta didik membuat negara yang seharusnya memiliki orang ilmiah, ketat, manusiawi, visi akomodatif. Selain itu, cinta tanah air adalah visi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

sedangkan misi Pembinaan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah untuk membantu peserta didik dalam membentengi karakternya, sehingga mereka mantap dan siap untuk memahami esensi Pancasila, perasaan suku dan cinta tanah air dalam menguasai, melaksanakan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, inovasi, dan kerajinan dengan kesadaran akan harapan tertentu dan kualitas yang mendalam (Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2006).

Tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan diatur dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Tujuannya adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:

- a. Berpikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan
- b. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta anti-korupsi
- c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama bangsa-bangsa lain.
- d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Dari tujuan yang telah diuraikan di atas, diketahui bahwa tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bermuatan beberapa pokok hal yang memuat nilai-nilai karakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki komponen-komponen yaitu pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*), dan karakter kewarganegaraan (*civic disposition*) yang masing-masing memiliki elemen. butir-butir dari ketiga elemen tersebut. Berdasarkan penjabaran di atas cenderung diungkapkan bahwa alasan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat diartikan sebagai mata pelajaran yang menyoroti penataan warga yang memiliki kemampuan keilmuan, kemampuan untuk mengikuti setiap tindakan Pancasila dan Ajaran Kewarganegaraan serta memiliki pribadi yang solid dalam rangka menjadikan warga dengan karakter dan pengetahuan. Adapun isi mata pelajaran PPKn di kelas XI adalah sebagai berikut :

- a. Hak Asasi Manusia, meliputi : kasus pelanggaran HAM, upaya penegakkan HAM
- b. Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, meliputi: batas wilayah NKRI, kedudukan Warga Negara Indonesia, kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia, dan system pertahanan dan keamanan NKRI
- c. Dinamika demokrasi, meliputi: hakikat demokrasi, penerapan demokrasi di Indonesia, perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi
- d. Penyelenggaraan kekuasaan Negara, meliputi: sistem pembagian kekuasaan NKRI, fungsi kementerian Indonesia, dan fungsi pemerintahan daerah
- e. Keadilan dan Perdamaian, meliputi; hakikat perlindungan dan penegakkan hukum, peran lembaga penegak hukum, dan pelanggaran hukum.

Dalam proses penelitian ini, peneliti memfokuskan pada materi Hak Asasi Manusia sesuai dengan waktu penelitian yang sedang membahas bab tersebut. Sehingga peneliti melakukan proses observasi pada pembelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan pada kelas XI SMAN 1 Pangkalpinang.

4. Hubungan Karakter Kejujuran dengan Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan

Hubungan karakter kejujuran dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan suatu hal yang berkaitan satu sama lain, Pembelajaran PPKn merupakan pembelajaran yang muatan materinya penuh dengan nilai-nilai karakter (Widiada, 2020). Dengan demikian, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berperan penting dalam membentuk kepribadian peserta didik, khususnya karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Berkaitan dengan membangun mimpi berbangsa dan bernegara Indonesia yang dibantu melalui pendidikan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Karakter sebagian besar dinyatakan sebagai tujuan definitif untuk memahami asal usul terbaik kewarganegaraan Indonesia. Dinyatakan bahwa PPKn merupakan pokok bahasan yang menyoroti penataan warga yang memahami dan dapat menyelesaikan hak-hak istimewa dan komitmennya

untuk menjadi warga yang cerdas, berbakat, dan berkarakter sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.(Aji, 2018).

Adapun Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang mengkaji dasar negara kita yakni Pancasila. Sehingga penanaman nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, baik melalui muatan materi yang terkandung didalam pelajaran PPKn. Sifat-sifat yang terkandung dalam Pancasila memiliki komponen total dalam membangun negara yang kokoh. Dari kelima statuta yang terkandung dalam Pancasila, memiliki kualitas masing-masing, yang satu sama lain memiliki hubungan sinergis dalam membangun negara ini. Itulah landasan Pancasila sebagai sumber perspektif dalam pendidikan karakter terutama karakter kejujuran.

Setiap peserta didik diharapkan mempunyai karakter jujur. Dengan mempunyai karakter yang baik maka peserta didik tersebut akan mempunyai perilaku yang baik (Widiada, 2020). Melalui pembelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan, hal ini akan membangun pemahaman tentang nilai-nilai kejujuran peserta didik. Dengan pemahaman yang layak tentang orang yang adil, peserta didik diandalkan untuk memiliki orang yang hebat dan sesuai dengan kepribadian Pancasila. Dengan demikian, pemahaman tentang kelebihan karakter kejujuran dalam pembelajaran PPKn sangat penting karena akan mempengaruhi karakter pada peserta didik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan karakter kejujuran dengan Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan memiliki kaitan yang erat, karena salah satu mata pelajaran yang didalam pelaksanaannya lebih memfokuskan pada pembentukan karakter peserta didik dan mampu meningkatkan karakter peserta didik adalah mata pelajaran PPKn.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan peneliti sebagai pijakan dalam kesempurnaan penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti . Adapun penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2

Tabel penelitian terdahulu

Peneliti / Tahun	Judul	Metode Analisis	Hasil Penelitian
T Heru Nurdiansah/2021	Pendidikan Pancasila Sebagai Upaya Membentuk Karakter Jujur	Metode kualitatif	Hasil penelitian memperlihatkan bahwa mata pelajaran PPKn berhasil membentuk karakter jujur peserta didik dibandingkan dengan keberadaan Kantin Kejujuran. Dan nilai nilai yang terdapat dalam perilaku jujur peserta didik sejalan dengan muatan materi dalam mata pelajaran PPKn yakni tentang nilai dan norma.
Manun/ 2018	Penanaman Nilai-Nilai Karakter melalui Mata Pelajaran Pendidikan	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanaman nilai-nilai karakter melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraann prosesnya berjalan cukup baik menggunakan berbagai dengan menggunakan penanaman nilai tindakan keteladanan, dan sebuah pembiasaan.
Putry julia & Ati/2019	Peranan Guru Dalam Meningkatkan Nilai Karakter Disiplin Dan Kejujuran Peserta didik	Deskriptif Kuantitatif	Total keseluruhan terdapat 83% guru sangat setuju dan memiliki upaya dalam meningkatkan karakter disiplin dan kejujuran peserta didik sedangkan hanya 17% setuju saja dalam melakukan hal tersebut, sehingga ditarik kesimpulan peranan guru sangat besar dalam membangun nilai karakter kedisiplinan dan kejujuran peserta didik.
AH. Mansur,dkk/ 2016	Model Pengajaran Karakter Kejujuran Menggunakan Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Tindakan kolaboratif partisipatif dan deskriptif analitik kuantitatif	Hasil dalam penelitian ini menggambarkan karakter kejujuran yang ingin diperbaiki melalui enam indikator yaitu; (1) Berkata Benar (2) Disiplin, (3) Komitmen, (4) Konsisten (5) Kewajaran, dan (6) Tanggung Jawab. Bahwa model pengajaran karakter kejujuran menggunakan

			teknologi informasi dan komunikasi sangat berpengaruh dan signifikan terhadap sikap perilaku jujur.
Winarno Narmoatmojo/ 2018	Pembudayaan Nilai –Nilai Pancasila Melalui Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah	metode analisis isi	Hasil dalam penelitian ini mengatakan bahwa Salah satu upaya menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa adalah dengan membudayakan konsep dan nilai Pancasila itu melalui jalur pendidikan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Pancasila selalu dimuatkan sebagai materi dari pendidikan kewarganegaraan di sekolah, meskipun dengan nama pelajaran yang berbeda-beda dan pemberian penekanan yang berbeda pula.

Sumber: Diadaptasi Peneliti 2021

Dari judul dan hasil penelitian terdahulu belum ditemukan budaya dari nilai karakter kejujuran yang diterapkan di dalam diri peserta didik melalui pembelajaran PPKn, penelitian sebelumnya kurang spesifik dalam membahas mengenai karakter terutama tentang karakter kejujuran akan tetapi karakter secara umum atau keseluruhan saja. Sementara karakter kejujuran sangat penting untuk dibahas secara spesifik dan mendalam. Oleh karena itu peneliti memiliki ketertarikan untuk melihat bagaimana nilai karakter kejujuran telah terimplementasikan dengan menawarkan judul *“Rekulturasasi Nilai-Nilai Kejujuran Peserta Didik Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Studi Deskriptif di SMAN 1 Kota Pangkalpinang)”*

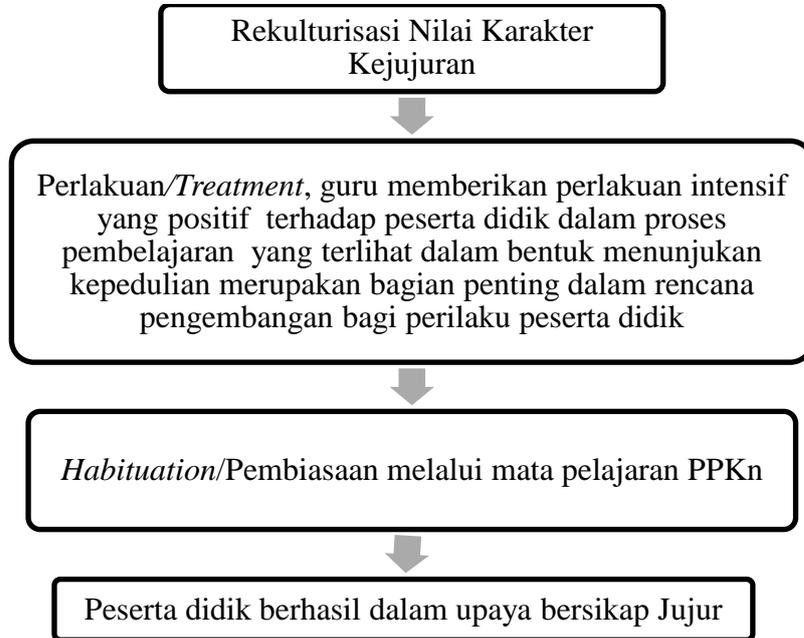
F. Kerangka Pemikiran

Peneliti membuat kerangka pemikiran mengenai garis besar tentang penelitian yang akan dilakukan. Dalam usaha merekulturasasi nilai karakter kejujuran peserta didik melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diperlukan suatu upaya perlakuan dan juga pembiasaan kepada peserta didik. sehingga diakhir nanti kita akan melihat peserta didik berhasil dalam bersikap jujur.

Berdasarkan deskripsi mengenai kerangka pemikiran di atas, maka peneliti dapat menggambarkan sebagai berikut.

Bagan 2.1

Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah Peneliti 2021